

IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA SAMARINDA

RIZKY ALAWIYAH¹

Abstrak

RIZKY ALAWIYAH, *Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda di bawah bimbingan Ibu Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si dan Bapak Dr. Enos Paselle, S.Sos, M.AP.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis program percepatan penanggulangan kemiskinan dan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Fokus penelitian antara lain isi kebijakan, lingkungan, faktor penghambat dan faktor pendukung. Key informannya yaitu Kepala Dinas, informannya Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dan Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial serta informan lainnya yaitu pegawai. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial ditinjau dari isi kebijakannya menunjukkan bahwa implementor kebijakan tersebut telah terinci dengan jelas dan telah melaksanakan kebijakan didukung oleh sumberdaya finansial yang baik. Kelompok sasaran dari program tersebut adalah kelompok fakir miskin atau masyarakat yang tidak mampu. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran baru mencapai 80%, perubahan yang diinginkan telah meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan belum mampu menurunkan jumlah masyarakat miskin di Kota Samarinda. Dukungan sumberdaya pun masih bernilai lemah untuk bidang pendidikan. Ditinjau dari lingkungannya menunjukkan bahwa para aktor pelaksana implementasi kebijakan tersebut memiliki kekuasaan, kepentingan dan strategi yang jelas berbasis bantuan sosial dengan karakteristik birokrasi yang sejalan dengan tujuan kebijakan. Namun tingkat responsivitas dan kepatuhan kelompok sasaran terhadap implementasi program belum sepenuhnya baik karena masih terdapat sebagian masyarakat

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rzallawiyah@yahoo.co.id

Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Rizky Alawiyah)
yang belum bisa menerimanya. Faktor penghambatnya dari kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, ketidaktepatan penentuan penerima bantuan program dalam implementasi program dan masalah administrasi dalam hal pemutakhiran data.

Kata Kunci : Implementasi, Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana otonomi daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan rehabilitasi sosial, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, penyelenggaraan urusan kesekretariatan, pelaksanaan unit pelaksana fungsional, pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian Dinas Kesejahteraan Sosial memiliki kewenangan sebagai pelaksana Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk Wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan permasalahan kemiskinan di setiap daerah belum terlihat, kurangnya peran Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam penanganan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah berjalan dirasa perlu untuk lebih dipertegas.

Dengan melihat uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda”.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Dye (dalam Islamy, 2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Implementasi Kebijakan Publik

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158).

Nawawi (2007:138) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

a. Teori George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi.
2. Sumberdaya.
3. Disposisi.
4. Struktur birokrasi.

b. Teori Merilee S. Grindle

Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup : (1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*; (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) Apakah letak suatu program sudah tepat; (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) Apakah sebuah program kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai.

c. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli.

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumber daya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining Weimer dan Vining.

Teori ini mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, (Ayat 1). Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. (Ayat 2).

Definisi Konseptual

Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda adalah pelaksanaan suatu bentuk rencana pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat, yang ditinjau dari aspek-aspek implementasi kebijakan publik berdasarkan isi kebijakan dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, berdasarkan Standar Operasional Pelayanan pegawai bang BRI. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan :
 - a. Isi Kebijakan
 - 1) Kelompok sasaran.
 - 2) Manfaat yang diterima kelompok sasaran.
 - 3) Perubahan yang diinginkan.
 - 4) Ketepatan program.
 - 5) Rincian implementor.
 - 6) Dukungan sumberdaya.
 - b. Lingkungan
 - 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor implementasi.
 - 2) Karakteristik institusi.
 - 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam penelitian ini merujuk pada 3 program, yaitu program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat.
2. Faktor penghambat dan pendukung pada implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, ada dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli sebagai berikut :

 - a. *Key informan* (Informasi Kunci) penelitian yaitu Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
 - b. Informan penelitian yaitu Kepala Bidang Bantuan Jaringan Sosial dan Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
 - c. Informan lainnya yaitu pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan dan diambil dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu :
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara (*interview*).
3. Penelitian dokumen atau dokumen *research*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif, dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang secara bersamaan : (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan / verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda

Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu SKPD menangani masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sasaran program pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah masyarakat kelas bawah yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami permasalahan kesejahteraan sosial atau rentan menimbulkan masalah di lingkungan sosialnya yang disebut PMKS yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Visi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yaitu :

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang mempunyai keunggulan daya kelola, berbasis teknologi kemasyarakatan dengan pelaksanaan tatakelola sosial yang berkualitas demi terwujudnya Samarinda sebagai Kota Metropolitan.

Misi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yaitu :

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kota Samarinda mempunyai misi :

- a. Mengentaskan atau mengurangi kemiskinan dan mencegah tumbuh dan berkembangnya serta mengatasi permasalahan sosial.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan tenaga relawan sosial.
- d. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
- e. Memelihara dan meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial.
- f. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Isi Kebijakan

Isi kebijakan terdiri dari kelompok sasaran, manfaat yang diterima kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan, ketepatan program, rincian implementor dan dukungan sumberdaya.

1. Kelompok sasaran. Kelompok sasaran merupakan masyarakat yang terpilih dalam kriteria program yang menjadi tujuan program yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sesuai dengan Program Penanggulangan Kemiskinan bidang kesejahteraan social melalui pengukuran indeks kedalaman kemiskinan, melalui kegiatan : fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan, peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya dan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi kelompok sasaran yaitu kelompok fakir miskin atau masyarakat tidak mampu, masyarakat yang jatuh sakit, kematian, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana, ibu hamil dan bayi serta pekerja anak. Pemerintah sudah memberikan pelayanan kesehatan seperti Jamkesda dan BPJS.
2. Manfaat yang diterima kelompok sasaran merupakan pencapaian tujuan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yang telah menjadi kegunaan positif dari pelaksanaan program. Kelompok sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menerima manfaat program yang dijalankan Dinas Kesejahteraan Sosial karena masyarakat mengetahui program tersebut, menerima bantuan sosial dan Dinas Kesejahteraan Sosial dapat memberikan kesejahteraan atau kemudahan dalam pelayanan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian manfaat yang diharapkan belum terpenuhi sepenuhnya untuk zona bebas anak, sebab masih banyak anak-anak jalanan, dan kurangnya pengawasan terhadap pendatang baru dari luar daerah yang menyebabkan banyaknya pengangguran, pengemis dan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda belum mampu sepenuhnya memberikan manfaat bagi kelompok sasaran dari kebijakan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tersebut.
3. Perubahan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesejahteraan Sosial menginginkan perubahan yang diinginkan dengan menjalankan tiga program yang dijalankan Dinas Kesejahteraan Sosial yaitu : Program Simpan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat bagi kelompok sasaran. Tetapi program tersebut belum mengurangi angka kemiskinan masyarakat di Kota Samarinda. Perubahan yang dimaksud antara lain : angka kemiskinan semakin menurun, pendidikan yang bermutu, kesehatan dan taraf hidup atau perekonomian masyarakat semakin lebih. Keberhasilan program mencapai 80%, sedangkan 20% dari pemanfaatan programnya belum tercapai seluruhnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akibat-akibat tersebut mengarah pada apa yang disebut dengan perubahan yang diinginkan oleh pelaksana kebijakan terhadap sasaran

- kebijakan (*target groups*) sebagai konsekuensi dari telah dilaksanakannya suatu kebijakan. Belum tercapainya perubahan yang diinginkan secara penuh dari implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (hanya 80%).
4. Ketepatan Program. Dinilai dari program yang dijalankan belum tepat sasaran sebab sesuai dengan tujuan dari Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun belum berhasil dicapai. Pencapaian hasil program masih belum tepat dilihat dari tolak ukur telah semakin meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat, tetapi kesejahteraan ekonomi belum teratasi dan jumlah masyarakat miskin justru bertambah. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu tahap atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tetapi tahapan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesejahteraan Sosial belum memberikan pendidikan formal/ non formal kepada anak jalanan yang berusia 5-14 tahun, ini artinya Dinas Kesejahteraan Sosial belum maksimal dalam pemberian pendidikan formal/non formal. Pemerintah bisa lebih peduli terhadap pendidikan anak jalanan dan bisa memberikan program pendidikan formal/nonformal kepada seluruh anak jalanan yang mau bersekolah ataupun melanjutkan sekolahnya karena pendidikan sangat penting bagi anak jalanan bagi masa depannya.
 5. Rincian Implementor adalah daftar para pelaksana kebijakan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dari instansi pemerintah pusat sampai pelaksana pemerintah di daerah, dari daftar para pelaksana seluruh pemerintahan dari Gubernur, Walikota, DPRD, SKPD, LSM, Ormas dan masyarakat yang bekerjasama terhadap program pemerintah yang diadakan, sehingga melaksanakan perannya dengan baik. Salah satu dari variabel isi kebijakan adalah apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Terkait dengan implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, implementor dari kebijakan tersebut telah disebutkan dengan rinci dan pada realitasnya implementor tersebut telah terlibat di dalam pengimplementasiannya.
 6. Dukungan Sumber Daya adalah hal-hal yang dapat mendukung dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan mulai sumberdaya manusia para pelaksana program, perlengkapan, peralatan maupun dana yang disalurkan pada sasaran program. Berdasarkan hasil penelitian, sumberdaya yang dibutuhkan dari program pendidikan adalah dana dan SDMnya. Namun sumberdaya ini masih ada yang lemah dan kuat dalam mendukung program pendidikan yang telah berjalan. Sumberdaya lemah yang dimaksud adalah pelaksanaan dana BOS dirasa masih belum cukup maksimal oleh sebagian masyarakat, dikarenakan pemanfaatannya masih banyak yang tidak memenuhi kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar serta belum adanya transparansi dalam pengelolaannya. Sementara sumberdaya yang masih kuat

disini dalam program pendidikan menunjukkan anggaran untuk belanja pendidikan mencapai 31% dari total anggaran tahun 2011. Dengan harapan pendidikan dapat mempermudah dalam mencari lapangan pekerjaan yang akan menentukan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka penyediaan sumberdaya manusia dan pendanaan untuk program bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih baik dan lebih serius oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang lebih optimal.

Lingkungan

1. **Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor implementasi.**
Berdasarkan hasil penelitian, para aktor pelaksana implementasi memiliki kekuasaan, kepentingan dan strategi dengan kebijakan dan program yang diterapkan di pemerintah, yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan penyediaan infrastuktur dasar (perumahan, listrik dan air bersih) dan peningkatan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan 4 kluster tersebut diharapkan tercapai target Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengacu pada 3 kluster yang dicanangkan secara nasional yaitu : bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, peningkatan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
2. **Karakteristik institusi adalah ciri-ciri instansi pemerintah Dinas Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Samarinda.** Karakteristik institusi sudah berjalan karena sesuai dengan tupoksi masing-masing yang sudah diterapkan oleh pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan seperti bidang bantuan dan jaminan sosial yang membidangi masalah pembinaan fakir miskin dan perlindungan sosial. Karakteristik institusi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan cara memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kegiatan kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di bidang bantuan dan jaminan sosial berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran adalah batas pada tingkat ketaatan dan daya tanggap kelompok sasaran program yang dilaksanakan Dinsos Kota Samarinda.** Responsivitas masyarakat yang sangat tinggi ini dikarenakan masyarakat diberikan hak untuk mengakses informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah sejak perencanaan awal sampai evaluasi akhir percepatan penanggulangan kemiskinan. Tingkat responsivitas kelompok sasaran terhadap pelaksanaan program, ada yang masih bisa

menerima dan ada yang belum bisa menerima karena sebagian masyarakat yang menerima sanggup melakukan program tersebut tanpa ada beban. Sementara yang belum bisa menerima harus menjalankan program/kegiatan tersebut secara perlahan dan tepat. Tolak ukurnya kembali kemasyarakatnya, apakah bisa menerima atau apakah menolak program pemerintahan yang sudah berjalan. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan belum baik. Tidak ada kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran dilihat dari program/kegiatan pemerintah, jadi belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat. Pemerintah kota ke pemerintah kota lainnya menjadi dari bahan tolak ukur membuat kebijaksanaan maupun program. Karena masing-masing daerah memiliki perbedaan kesejahteraan sosial maupun taraf hidup. Responsivitas kelompok sasaran tidak tanggap dalam menerima pembinaan anak jalanan. Sesuai dengan kebutuhan anak jalanan dilihat dari daya tanggap Dinas Kesejahteraan Sosial memberikan segala fasilitas dan keutuhan yang diberikan kepada anak jalanan, dan kepedulian Dinas Kesejahteraan Sosial untuk memberikan keterampilan dan modal usaha bagi anak jalanan.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung pada Implementasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Faktor Penghambat

- a. Kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pandangan konvensional kemudian mengalami perkembangan dengan munculnya pandangan berbasis hak (*right based approach*) yang mengatur kewajiban negara dalam penanggulangan kemiskinan, yang artinya negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif. Terutama di dalam Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (dalam Wijaksana,2005:98) bahwa masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya. Maka dari itu, sangat penting bagi pemerintah untuk dapat

menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian penulis, apabila jumlah lapangan pekerjaan yang mampu disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, maka tentu saja penanggulangan kemiskinan akan mengalami hambatan.

- b. Ketidaktepatan penentuan penerima bantuan program dalam implementasi program.

Ketepatan *target groups* dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan salah satu unsur yang penting dan mutlak, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah (2000:11). Sebab sebuah program atau kebijakan tentunya diharapkan untuk bermanfaat bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program atau kebijakan. Sehingga apabila pelaksana program memberikan kemanfaatan suatu program kepada *target group* yang salah. Maka hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan program. Dalam implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, ketidaktepatan penentuan *target group* disinyalir akibat dari kurang pemahannya para pegawai dalam hal penentuan penerima bantuan sosial. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap implementasi program yang berasal dari intern dinas maupun dari ekstern dinas belum berjalan sebagaimana mestinya.

- c. Masalah administrasi dalam hal pemutakhiran data.

Pemutakhiran data berkenaan dengan ketepatan penentuan penerima bantuan program atau *target group* program. Dalam program penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data berguna untuk memverifikasi kondisi sosial para penerima bantuan sehingga benar-benar memenuhi kriteria sebagai *target group* program. Sebab bisa jadi, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang telah menjadi penerima bantuan pada masa pemberian bantuan berikutnya, mereka sudah tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan program. Selain daripada itu, data status masyarakat seperti masih hidup atau telah meninggal dunia juga perlu diperiksa atau *diupdate* sesuai kondisi riilnya.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mendukung dan mempermudah Implementasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. Pembahasan mengenai lima faktor pendukung yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli sebagai pengajar bagi para masyarakat serta pemberian modal bagi UKM oleh pemerintah. Tertuang di dalam Dokumen Strategi Nasional (Bappenas) (dalam Wijaksana,2005:98) bahwa masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan. Keterbatasan modal, kurangnya keterampilan dan pengetahuan,

menyebabkan masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sempit untuk mengembangkan usaha. Maka dari itu, dalam implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan pemberian pelatihan dan penyediaan pengajar serta pemberian modal bagi masyarakat dan UKM.

- b. Adanya komunikasi yang efektif dan dukungan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai.

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan kebijakan *top-down*, implementasinya tentu sangat dipengaruhi oleh komunikasi, yang merupakan variabel penentu yang pertama atas keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut pandangan Edwar III (dalam Nawawi, 2007:138). Dalam uraian mengenai variabel komunikasi, Edward III menyatakan bahwa implemntor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mengurangi distorsi implementasi. Sumberdaya tersebut dapat berwujud SDM, maupun sumberdaya finansial dan sumberdaya-sumberdaya lainnya, sebagaimana dalam implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

- c. Struktur organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial yang sederhana.

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda memiliki struktur organisasi yang tidak berbelit-belit atau sederhana, sehingga hal ini mendorong implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang baik. Hasil implementasi yang berbeda akan terjadi apabila struktur organisasi pelaksana kebijakannya tidak sederhana atau rumit.

- d. Adanya kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat mengenai Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Proses penyampian informasi atau transmisi, kejelasan informasi serta konsistensi informasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan terhadap sasaran kebijakan (*target groups*) merupakan aspek-aspek yang terkandung dalam faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik. Demikian pula hanya dengan implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana Dinas Kesejahteraan Sosial dapat memberikan informasi mengenai kebijakan tersebut secara jelas sehingga mudah dalam pelaksanaannya.

- e. Tingkat penerimaan masyarakat yang positif terhadap program.

Dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap dilaksanakannya suatu kebijakan oleh pemerintah merupakan hal yang tak kalah penting. Ketika sebuah kebijakan dapat diterima secara baik oleh sasaran kebijakan (*target groups*), maka pengimplemntasiannya akan semakin mudah dan cepat, sebab tidak ada pertentangan, penolakan ataupun penyangsian dari masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka implementasi kebijakan tersebut akan semakin mudah dan cepat pula dalam mencapai tujuannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ditinjau dari isi kebijakan yaitu program percepatan penanggulangan kemiskinan telah menerima manfaat program dijalankan Dinas Kesejahteraan Sosial karena masyarakat mengetahui program tersebut, hanya saja dari segi pemanfaatannya dan manfaat yang diharapkan masih belum terpenuhi seperti zona bebas anak, masih banyak anak-anak jalanan, kurangnya pengawasan terhadap pendatang baru dari luar daerah yang menyebabkan pengangguran, pengemis dan anak jalanan semakin meningkat. Dukungan anggaran pemerintah pusat, masih lemah pada pelaksanaan dana BOS kepada masyarakat.
2. Ditinjau dari lingkungan terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor implementasi adalah wewenang, kebutuhan dan cara para pelaksana program atau kegiatan dalam melaksanakan Program. Para aktor pelaksana implementasi memiliki strategi, dengan memiliki staf ahli, instansi pemerintahan yang terkait dengan kebijakan, program yang diterapkan di pemerintah. Sebagian dari program pemerintah belum sepenuhnya diterapkan dimasyarakat. Dalam menjalankan program ini, sebagian dari masyarakat sudah menjalankan program tersebut dikehidupan masyarakat. Pada anak-anak jalanan dan pengemis. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan Program sangat baik. Sejalan karena tugas dari Dinas Kesejahteraan Sosial itu memberikan program/kegiatan seperti memberikan pelatihan terhadap anak-anak jalanan. Sebagian dari program/kegiatan pemerintah belum sepenuhnya diterapkan dimasyarakat. Sebagian dari masyarakat sudah menjalankan program tersebut dikehidupan masyarakat. Pemerintah kota ke pemerintah kota lainnya menjadi dari bahan tolak ukur membuat kebijaksanaan maupun program. Karena masing-masing daerah memiliki perbedaan kesejahteraan sosial maupun taraf hidup.
3. Faktor penghambat implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dijalankan Dinas Kesejahteraan Sosial antara lain kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah dalam menangani jumlah pengangguran yang ada di Samarinda. Sikap pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial yang kurang memahami mengenai kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang dapat mempengaruhi terhambatnya proses Program Penanggulangan Kemiskinan.
4. Faktor pendukung implemtasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yaitu dari pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan modal (UKM) Usaha Kecil Menengah dan menyediakan tenaga ahli sebagai pengajar.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah di kemukakan diatas dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda perlu memperluas kerjasama dengan pihak swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk kelompok sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang belum memperoleh kesempatan kerja, sehingga jumlah pengangguran dapat diminimalisir.
2. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda perlu melakukan pemutakhiran data secara rutin dan jeli agar data penerima bantuan sesuai dengan realitas
3. kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program dan implementasi program dapat benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok sasaran yang ditetapkan.
4. Para pemimpin tingkat atas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda hendaknya memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi program agar dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam implementasi program tersebut sehingga dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
5. Diperlukan pengawasan ekstern atau di luar dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yaitu dari pihak masyarakat sendiri, LSM dan organisasi massa pemerhati masalah kemiskinan untuk turut mensukseskan implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tersebut.
6. Diperlukan perhatian, komitmen dan strategi yang lebih besar dan lebih tepat dari Walikota dan Pemerintah Kota dalam hal penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan dan penanganan anak jalanan serta penduduk pendatang baru melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, termasuk pengadopsian kebijakan penanganan anak jalanan dan penduduk pendatang baru dari wilayah-wilayah di Indonesia yang telah berhasil mengatasinya.

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ed.2*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Islamy, Irfan, M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksar : Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Tahjan, H, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, RTH : Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset YPAPI : Yogyakarta.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. UNY Press : Yogyakarta.